

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi saat ini berbagai skandal dan kecurangan akuntansi terkait kasus manajemen laba sangat marak terjadi. Kasus tersebut merupakan suatu perilaku manajer perusahaan untuk mempengaruhi laba dalam laporan keuangan dengan cara meninggikan atau merendahkan laba sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai (Supriyono, 2018:123). Perilaku ini merupakan tindakan kecurangan karena manajer perusahaan secara sengaja melakukannya supaya para *stakeholder* yang ingin mengetahui kondisi ekonomi perusahaan tertipu karena mendapatkan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Perilaku ini dilakukan oleh manajer dengan memanfaatkan kelemahan pihak lain yang tidak mempunyai sumber dan akses yang memadai untuk mendapatkan informasi mengenai perusahaan (Sulistiyanto, 2018:4).

Praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajer tersebut sering kali terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan. Manajemen mempunyai kepentingan untuk mendapatkan kompensasi kontrak semaksimal mungkin seperti bonus atau lainnya untuk mencapai kesejahteraan pribadi, sedangkan pemegang saham mempunyai kepentingan terhadap perkembangan modal yang ditanam (Wardani dan Santi, 2018). Saat ini manajemen laba tersebut seolah-olah sudah menjadi budaya yang sering di praktikan di berbagai perusahaan didunia. Selain itu manajemen laba juga membuat dunia usaha seolah-olah menjadi pelaku korupsi, kolusi, dan berbagai penyelewengan lain yang dapat merugikan publik atas kecurangan yang dilakukan oleh manajer tersebut. Publik menganggap apa yang diinformasikan oleh dunia usaha itu hanya merupakan akal-

akalan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompok tertentu tanpa memperhatikan kepentingan pihak lain (Sulistiyanto 2018:3).

Salah satu penyebab terjadinya praktik manajemen laba ini karena masih lemahnya penerapan *Corporate Governance*. *Corporate Governance* merupakan suatu struktur yang dapat membantu untuk memastikan bahwa manajemen memanfaatkan sumber daya perusahaan dengan baik demi kepentingan semua pihak secara adil dan melaporkan kondisi keuangan dan operasi kinerja perusahaan (Lin dan Hwang 2010 dalam Patrick *et al*, 2015). *Corporate Governance* merupakan faktor yang dapat menentukan apakah manajemen perusahaan akan terlibat dalam tindakan manajemen laba atau tidak. Lemahnya penerapan *Corporate Governance* ini sering dikaitkan dengan praktik manajemen laba yang lebih besar (Klein, 2002 dalam Dabor dan Ibadin, 2013). Ciri utama dari lemahnya penerapan *Corporate Governance* adalah adanya tindakan-tindakan yang mementingkan kepentingan dan kesejahteraannya sendiri dan mengabaikan kepentingan investor. Jika para manajer perusahaan melakukan tindakan yang hanya mementingkan kepentingan dan kesejahteraannya sendiri dengan mengabaikan kepentingan investor, maka akan mengakibatkan jatuhnya harapan para investor tentang *return* atas investasi yang telah mereka tanamkan pada perusahaan tersebut. Penerapan *Corporate Governance* ini sangat berkaitan dalam meyakinkan para investor bahwa manajemen perusahaan tidak bertindak hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi terhadap modal yang ditanamkan, tetapi penerapan *Corporate Governance* juga akan meningkatkan kualitas pekerjaan pada karyawan sehingga memberi dampak pada kinerja perusahaan secara menyeluruh (Taufik dan Christiawan, 2017).

Lemahnya penerapan *Corporate Governance* pada praktik manajemen laba ini cenderung mengarah pada laporan keuangan perusahaan sebab laporan keuangan perusahaan dapat digunakan sebagai salah satu sarana dan sumber pengkomunikasian tentang informasi keuangan yang digunakan oleh para pemakai laporan dalam menilai kinerja perusahaan. Dengan demikian ada kemungkinan para manajer

perusahaan melakukan praktik manajemen laba dengan memanipulasi angka-angka dalam laporan keuangan untuk menunjukkan agar laporan keuangan tersebut terlihat baik dan memenuhi kriteria bagi investor sehingga investor bersedia menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut (Arlita *et al*, 2019). Menurut PSAK Nomor 1 Tahun 2017 mendefinisikan bahwa laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja entitas. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang berguna bagi pemakai laporan dalam pembuatan dan pengambilan keputusan yang tepat. Laporan keuangan itu sendiri terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut dapat menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Pada dasarnya semua bagian dari laporan keuangan itu penting dan diperlukan untuk pengambilan keputusan. Tetapi para pemakai laporan keuangan sebagian besar lebih terfokus pada informasi laba dalam laporan laba rugi tanpa memperhatikan prosedur-prosedur yang digunakan untuk menghasilkan laba atau rugi tersebut.

Laporan laba rugi merupakan laporan yang dihasilkan oleh perusahaan untuk mengukur dan menilai kinerja perusahaan selama periode tertentu. Laporan laba rugi ini sering kali digunakan oleh para investor dalam melihat profitabilitas perusahaan dan memprediksi prospek perusahaan di masa mendatang. Para investor sering kali menggunakan laba sebagai alat ukur dalam menilai prestasi suatu perusahaan. Apabila perusahaan menghasilkan laba yang terus meningkat, maka dengan begitu prestasi perusahaan juga akan semakin baik. Akan tetapi, laba yang dihasilkan dalam laporan laba rugi perusahaan sering kali dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan sehingga laba yang besar belum tentu mencerminkan kas yang besar. Laba merupakan cerminan kinerja perusahaan yang dapat dikelola secara efisien atau oportunistik. Laba yang dikelola secara efisien artinya laba tersebut dikelola dengan tujuan untuk meningkatkan keinformatifan informasi. Sedangkan laba yang dikelola

secara oportunistik artinya laba tersebut dikelola sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan dapat menguntungkan pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini, manajemen perusahaan lebih sering mengelola laba secara oportunistik dan memanipulasi laporan keuangan perusahaan supaya laba yang dihasilkan perusahaan terlihat baik dan memuaskan yang sering kali tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya guna memperlihatkan prestasi perusahaan dalam menghasilkan laba. Manajemen perusahaan dapat menentukan kebijakan penggunaan metode akuntansi dalam menyusun laporan keuangan agar tujuan yang diinginkan oleh perusahaan tercapai.

Pilihan kebijakan akuntansi yang dilakukan oleh manajer perusahaan untuk mempengaruhi laba dengan cara menaikkan atau menurunkan laba sesuai dengan keinginan pihak-pihak tertentu disebut dengan manajemen laba (Dewi *et al*, 2019). Sedangkan menurut Fahmi (2014), manajemen laba adalah suatu tindakan yang mengatur laba agar sesuai yang diinginkan oleh pihak tertentu terutama oleh manajemen perusahaan. Praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan muncul karena adanya hubungan agensi antara *agent* (manajer) dan *principal* (pemegang saham). Hubungan agensi tersebut dijelaskan dalam teori keagenan.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Santoso (2016), teori keagenan adalah hubungan kontraktual antara *agent* dan *principal*. Hubungan ini dilakukan untuk suatu jasa dimana *principal* memberikan wewenang kepada *agent* mengenai pengambilan keputusan yang terbaik bagi *principal* dengan mengutamakan kepentingan dalam memaksimalkan laba perusahaan. Prinsip utama dalam teori keagenan adalah adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang yaitu *principal* dan pihak yang menerima wewenang yaitu *agent*. Dalam hubungan agensi ini sering kali terjadi konflik yang muncul antara *agent* dan *principal* yang disebut dengan konflik agensi. Konflik agensi ini terjadi karena adanya kecenderungan manajer perusahaan yang lebih mementingkan kepentingan dan kesejahteraannya sendiri dibandingkan kepentingan dan kesejahteraan perusahaan.

Pihak yang lebih mengetahui kondisi internal perusahaan dan prospek perusahaan dimasa yang akan datang adalah manajer, sedangkan pemegang saham mengetahui keadaan dan prospek perusahaan dimasa yang akan datang hanya melalui informasi yang diberikan oleh manajer (Primarini dan Kusumaningrim, 2018). Hal tersebut menunjukkan bahwa manajer mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat tentang keadaan perusahaan kepada para pemegang saham. Namun informasi yang diterima oleh pemegang saham terkadang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Kondisi ini dikenal dengan asimetri informasi. Asimetri informasi antara *agent* dan *principal* dapat memberikan kesempatan bagi *agent* untuk melakukan praktik manajemen laba (Supatminingsih dan Wicaksono, 2019).

Saat ini manajemen laba merupakan isu sentral atau bahkan telah menjadi fenomena umum yang terjadi di sejumlah perusahaan. Sejak krisis ekonomi menerpa Indonesia, masih banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan manipulasi laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena adanya benturan kepentingan antara pemangku kepentingan perusahaan dan keterbukaan informasi (Sumantri dan Purnamawati, 2015).

Dilansir dari CNBC Indonesia pada tanggal 8 Januari 2020, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan dalam pemeriksaan investigasi pendahuluan, ditemukan adanya rekayasa laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya yang melakukan manipulasi laba sebesar Rp 360,3 miliar pada tahun 2006. Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, bahwa pembukaan laba keuangan tersebut mendapat opini kurang wajar karena adanya kekurangan pencadangan sebesar Rp 7,7 triliun. Pada tahun 2017, BPK melihat adanya kecurangan pencadangan sebesar Rp 7,7 triliun tersebut dan jika PT Asuransi Jiwasraya melakukan pencadangan, maka akan terlihat bahwa perusahaan tersebut mengalami kerugian sebesar Rp 15,3 Triliun. Pada tahun 2018, PT Asuransi Jiwasraya kemudian membukukan kerugian *unaudited* sebesar Rp 15,3 triliun dan hingga September 2019, diperkirakan kerugian perusahaan

tersebut mencapai Rp 13,7 triliun. Kemudian pada posisi November 2019, perusahaan tersebut diperkirakan mengalami negatif ekuitas sebesar Rp 27,2 triliun.

Dari kasus tersebut menunjukkan bahwa adanya pelanggaran praktik manajemen laba dalam pelaporan keuangan bukanlah suatu hal yang baru. Tingkat persaingan yang semakin tinggi dapat memunculkan suatu dorongan atau tekanan pada perusahaan-perusahaan efek untuk saling berlomba-lomba menunjukkan kualitas dan kinerja perusahaan yang baik dan tidak peduli apakah cara yang digunakan tersebut benar atau tidak. Hal ini merupakan suatu tantangan bagi calon investor dalam menilai apakah informasi dalam laporan keuangan tersebut menggambarkan fakta atau hanya hasil dari manipulasi pihak manajemen perusahaan saja. Selain itu dampak yang akan timbul dari praktik manajemen laba tersebut diantaranya perusahaan akan kehilangan dukungan dari para pemangku kepentingannya (*stakeholder*), para pemangku kepentingan (*stakeholder*) merasa tidak puas terhadap kinerja perusahaan yang dimanipulasi sehingga akan berimbas dalam merusak reputasi atau nilai perusahaan di pasar modal.

Untuk mengurangi praktik manajemen laba dan meningkatkan kualitas laporan keuangan, perusahaan perlu melakukan penerapan *Corporate Governance*. Penerapan *Corporate Governance* dapat dijadikan sebagai pedoman bagi manajer perusahaan dalam mengelola perusahaan dengan baik dan dapat membantu manajer dalam membuat keputusan yang dapat menguntungkan semua pihak (Susilowati, 2015). Menurut *Forum For Corporate Governance in Indonesia* (2001) dalam Samuel (2019), *Corporate Governance* adalah suatu peraturan yang mengatur hubungan antara pengelola perusahaan, pemegang saham, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan baik eksternal maupun internal untuk mengendalikan perusahaan. *Corporate Governance* juga merupakan seni sekaligus strategi manajemen kunci dalam lingkungan bisnis yang bisa menentukan seberapa besar tingkat keberhasilan perusahaan untuk mencapai kondisi *high profile*, kinerja keuangan, dan kinerja perusahaan yang baik (Sonmez dan Yildirim, 2015).

Tujuan utama dari penerapan *Corporate Governance* ini adalah untuk meningkatkan nilai tambah bagi *stakeholders* dalam jangka panjang serta melindungi para pemegang saham dan pengelola perusahaan atau manajemen perusahaan (Putri, 2018). Penerapan *Corporate Governance* secara konsisten berprinsip pada transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran yang terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dengan adanya prinsip *Corporate Governance* tersebut diharapkan dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya (Manossoh, 2016:102). Penerapan *Corporate Governance* ini didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. *Corporate Governance* ini ditunjukkan untuk mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha perseroan yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang yang akan memberikan manfaat dan nilai tambah kepada pemangku kepentingan.

Mekanisme *Corporate Governance* dikelompokkan menjadi dua mekanisme yaitu internal dan eksternal. Mekanisme internal adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komposisi dewan komisaris, komposisi dewan direksi, dan pertemuan dengan *board of director*. Sedangkan mekanisme eksternal adalah cara untuk mempengaruhi perusahaan seperti pengendalian oleh perusahaan, struktur kepemilikan, dan pengendalian pasar (Pitoyo *et al*, 2019). Dalam penelitian ini, penerapan *Corporate Governance* akan dilihat dari mekanismenya dengan proksi proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional dengan ukuran perusahaan dan *leverage* sebagai variabel kontrol

Dewan komisaris independen merupakan salah satu mekanisme pengawasan yang diduga dapat menghindari praktik manajemen laba dalam perusahaan. Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan dengan manajemen, direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan

pemegang saham pengendali (Giovani, 2017). Dalam upaya untuk mengelola perusahaan dengan mengikuti aturan umum *Corporate Governance*, peran dewan komisaris independen sangat penting dan diperlukan dalam perusahaan karena dewan ini akan mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktik-praktik prinsip *Corporate Governance* sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sochib, 2016:33). Selain itu dewan ini juga dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang timbul antara para manajer internal, dan dapat mengawasi kebijakan manajemen serta dapat memberikan nasihat kepada manajemen perusahaan (Fama dan Jensen, 1983 dalam Sochib, 2016:34). Adanya dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan bertujuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dan para pemangku kepentingan lainnya serta menjaga prinsip keadilan (Effendi, 2016:43). Dengan demikian adanya dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan ini dapat meminimalisir konflik kepentingan yang muncul antara *agent* dan *principal* karena dewan ini akan bersikap objektif dalam pengambilan keputusan, dimana komisaris independen akan memberi masukan jika muncul penyimpangan pengelolaan usaha sehingga *adverse selection* dan *moral hazard* dapat dihindari. Dengan demikian semakin besarnya jumlah dewan komisaris independen dalam perusahaan maka pengawasan yang dilakukan terhadap laporan keuangan juga akan semakin ketat sehingga tindakan kecurangan dan manipulasi yang dilakukan oleh manajer terhadap laba perusahaan dapat diminimalisir dan praktik manajemen laba dapat dihindari (Mahadewi dan Krisnadewi, 2017).

Kepemilikan manajerial juga diduga mampu memberikan mekanisme pengawasan yang sama dalam perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan yang ikut serta dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut menunjukkan bahwa manajemen perusahaan akan bertindak sama seperti pemegang saham karena manajemen mempunyai kepemilikan saham dalam perusahaan (Wijaya *et al*, 2017). Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Swai dan Mbogela (2016) menyatakan bahwa

semakin besar kepemilikan manajemen dalam suatu perusahaan, maka manajemen akan berupaya semaksimal mungkin dalam memenuhi kepentingan semua pihak. Dengan demikian apabila manajer mempunyai kepemilikan saham dalam perusahaan, maka manajer akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham sehingga perilaku oportunistik yang mungkin akan dilakukan oleh manajer tersebut dapat dihindari sehingga praktik manajemen laba dapat diminimalisir. Sedangkan apabila kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajer rendah, maka kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik atau tindakan manipulasi yang dilakukan oleh manajer perusahaan akan semakin meningkat (Shleifer dan Vishny, 1986 dalam Wijaya *et al*, 2017).

Selain itu kepemilikan institusional juga diduga mampu memberikan mekanisme pengawasan yang sama dalam perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan saham yang dimiliki oleh pihak institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi, bank, dan kepemilikan institusi lainnya dalam perusahaan (Mahadewi dan Krisnadewi, 2017). Kepemilikan institusional sangat berperan penting dalam meminimalisir konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham karena kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi ini dapat menghambat manajer perusahaan untuk terlibat dalam perilaku oportunistik dalam manajemen laba (Farooq dan Hind, 2012). Pada dasarnya investor institusional merupakan pemegang saham yang mempunyai pengaruh besar dalam perusahaan karena kepemilikan sahamnya yang besar dapat mempunyai peluang, sumber daya, dan kemampuan dalam memantau manajer perusahaan (Mahadewi dan Krisnadewi, 2017). Oleh karena itu, kepemilikan saham oleh pihak institusional dikaitkan dengan pemantauan secara aktif terhadap kegiatan manajemen sehingga dapat mengurangi kemampuan manajer perusahaan untuk melakukan manipulasi laba (Swai dan Mbogela, 2016). Keberadaan investor institusional ini sering dianggap mempunyai kemampuan untuk melakukan pengawasan yang tepat dalam pengambilan keputusan yang diambil oleh manajer perusahaan. Hal ini disebabkan karena investor institusional ikut terlibat dalam pengambilan keputusan yang strategis sehingga tidak

mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba yang dilakukan oleh manajer perusahaan (Mahadewi dan Krisnadewi, 2017). Menurut Elyasiani *et al* (2019) menyatakan bahwa apabila kepemilikan saham institusional yang tinggi, maka akan dapat mengurangi praktik manajemen laba dan sebaliknya, apabila kepemilikan saham institusional rendah maka akan meningkatkan praktik manajemen laba.

Penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan dan *leverage* sebagai variabel kontrol untuk mendukung pengaruh *Corporate Governance* terhadap manajemen laba. Ukuran perusahaan merupakan ukuran besar atau kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan dari total aset maupun total penjualan. Ukuran perusahaan dapat menentukan banyak atau sedikitnya praktik manajemen laba yang dilakukan dalam perusahaan (Mahiswari dan Nugroho, 2014 dalam Florecia dan Susanti, 2019). Ada dua pandangan mengenai ukuran perusahaan yaitu semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka peluang untuk melakukan praktik manajemen laba semakin kecil. Kondisi tersebut dapat terjadi karena perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh publik sehingga perusahaan tersebut akan menjaga nama baiknya dengan tidak melakukan hal-hal yang negatif atau menyimpang. Berbeda dengan perusahaan kecil, perusahaan yang kecil itu lebih mempunyai peluang untuk melakukan praktik manajemen laba dengan tujuan untuk memperlihatkan kinerja perusahaan yang baik yang secara tidak langsung dapat membantu meningkatkan nilai perusahaan (Wardani dan Santi, 2018).

Leverage merupakan proporsi atas penggunaan hutang untuk membiayai investasinya. Semakin besar rasio *leverage* maka semakin tinggi pula hutang perusahaan. Menurut Firth dan Smith (1992) dalam Savitri dan Priantinah (2019) menyatakan bahwa semakin besar hutang yang dimiliki oleh perusahaan maka pengawasan yang dilakukan oleh pihak kreditor akan semakin ketat. Hal tersebut dapat mengakibatkan kemampuan manajemen perusahaan untuk melakukan praktik manajemen laba akan semakin berkurang (Savitri dan Priantinah, 2019). Menurut Jensen (1986) dalam Utami dan Handayani (2019), penciptaan hutang dapat mengurangi perilaku oportunistik yang dilakukan oleh para manajer. Hal ini berarti

bahwa semakin tinggi rasio *leverage* maka semakin kecil kemungkinan manajemen perusahaan melakukan praktik manajemen laba. Sebaliknya semakin kecil rasio *leverage* maka semakin tinggi pihak manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba dalam perusahaan (Savitri dan Priantinah, 2019).

Obyek dalam penelitian ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perusahaan yang dipilih adalah perusahaan manufaktur. Alasan penulis memilih perusahaan manufaktur karena perusahaan ini merupakan perusahaan yang berskala besar jika dibandingkan dengan perusahaan lainnya, Selain itu perusahaan manufaktur juga mempunyai saham yang tahan terhadap krisis ekonomi karena sebagian besar produk-produk manufaktur mempunyai peranan yang penting bagi kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Dalam penelitian ini, alasan penulis memilih judul Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Manajemen Laba karena sejak krisis ekonomi pada tahun 1998 sampai saat ini fenomena manajemen laba masih sering terjadi di berbagai perusahaan di dunia. Banyak faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perilaku manajemen laba tersebut. Tetapi faktor yang paling dominan terjadinya praktik manajemen laba ini adalah *Corporate Governance*. Praktik manajemen laba masih sering terjadi karena masih lemahnya penerapan *Corporate Governance* yang dipraktikkan dalam suatu perusahaan. Selain itu dalam berbagai penelitian yang telah dilakukan masih terdapat perbedaan hasil atas penelitian-penelitian yang serupa. Dengan demikian, penulis ingin memperbaharui penelitian dan mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil yang akan di peroleh nantinya dibandingkan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya karena penelitian yang akan dilakukan itu membedakan koefisien manajemen laba perkelompok industri pertahun. Selain itu, penulis memilih tahun 2016-2019 dengan alasan karena untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat sesuai dengan kondisi saat ini. Selain itu, tahun 2016-2019 dipilih karena tahun tersebut merupakan tahun terkini yang memungkinkan untuk dijadikan populasi penelitian terkait ketersediaan dan kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Berdasarkan penelitian terdahulu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Larastomo *et al* (2016) menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdillah *et al* (2016) yang menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Namun hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Barus dan Setiawati (2015) yang menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnama (2017) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Namun hasil ini berbeda dengan penelitian Arifin dan Destriana (2016) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Menurut penelitian Utari dan Sari (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2016) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Marsha dan Ghozali (2017) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Menurut penelitian Purnama (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ponto dan Rasyid (2017) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Namun hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lupita dan Meiranto (2018) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Menurut penelitian Savitri dan Priantinah (2019) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arlita *et al* (2019) yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Namun hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fuad (2019) yang menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas dan disertai dengan adanya ketidakkonsistenan hasil yang ditemukan didalam penelitian terdahulu, maka membuat peneliti merasa tertarik dan termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba”***

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Apakah Proporsi Dewan Komisaris Independen memiliki pengaruh negatif terhadap Manajemen Laba?
2. Apakah Kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh negatif terhadap Manajemen Laba?
3. Apakah Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh negatif terhadap Manajemen Laba?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan bukti empiris atas pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap manajemen laba.
2. Memberikan bukti empiris atas pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba.
3. Memberikan bukti empiris atas pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bidang Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh *Corporate Governance* terhadap manajemen laba.

2. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris terkait dengan faktot-faktor yang mempengaruhi manajemen laba sebagai bentuk pengawasan perusahaan dalam melaksanakan *Corporate Governance* sehingga regulator dapat menetapkan standar kebijakan penegakan hukum serta memperjelas peran dan tanggung jawab dewan dalam mendukung pelaksanaan *Corporate Governance*.

3. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan mengetahui pengaruh *Corporate Governance* terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur di Indonesia sehingga dapat membantu investor dalam membuat keputusan investasi yang tepat.